

**SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA****Peluncuran Bersama Kartu Berlogo Nasional GPN  
Bank Indonesia, 3 Mei 2018**

---

*Yang kami hormati,*

- ***Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Soemarno***
- ***Menteri Sosial, Bapak Idrus Marham***
- ***Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Heru Kristiyana***
- ***Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia***
- ***Ketua Perhimpunan Bank Nasional***
- ***Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia***
- ***Para Pimpinan Bank dan Mitra Kerja di Bidang Sistem Pembayaran***
- ***Hadirin dan Undangan yang berbahagia,***

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

***Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua***

1. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini.
2. Kehadiran kita pada hari ini menandai suatu *milestone* penting dalam pengembangan Sistem Pembayaran di Indonesia yaitu Peluncuran Bersama Kartu Berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN dapat memulai implementasi secara penuh dan digunakan secara luas oleh masyarakat berkat kerja sama yang harmonis dan sinergis

antara Bank Indonesia dengan Pemerintah khususnya Kementerian Sosial, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR, OJK serta industri perbankan dan sistem pembayaran. Untuk itu dalam awal sambutan ini, kami mengucapkan apresiasi yang tinggi atas dukungan Bapak dan Ibu sekalian.

***Bapak dan Ibu sekalian,***

3. Sistem Pembayaran di Indonesia berkembang sangat cepat. Semakin meluasnya *the internet of things* seperti *e-commerce*, *fintech* dan jasa transportasi berbasis aplikasi menyebabkan kebutuhan akan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal terus meningkat. Berbagai inovasi terkait cara dan sarana pembayaran marak ditawarkan untuk mempermudah, mempermudah dan mempercepat proses bertransaksi.
4. Dinamika perubahan tersebut perlu disikapi dengan cermat dan hati-hati oleh regulator. Regulator perlu memerhatikan tidak hanya potensi, namun juga risiko yang dikandung inovasi tersebut. Perumus kebijakan perlu menimbang dampak regulasi dari berbagai sisi yang seringkali bersifat *trade-off*, antara dampak jangka pendek dan kesinambungan jangka panjang. Aspek-aspek penting yang menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan mencakup persaingan usaha, pembentukan harga, insentif inovasi, daya tarik industri bagi investor dan kualitas maupun ketepatan waktu respons kebijakan.
5. Mempertimbangkan dinamika perubahan yang bersifat cepat dan menyeluruh di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia menyusun *Blueprint* Pengembangan Sistem Pembayaran Indonesia. *Blueprint* ini memungkinkan kami melakukan respons yang tertata dan terencana,

tidak bersifat *ad-hoc*, sehingga dapat memberikan kejelasan arah ke depan tidak hanya bagi regulator, namun juga bagi industri, pelaku usaha dan masyarakat.

***Hadirin yang kami hormati,***

6. Diluncurkannya GPN merupakan momentum penting dalam pengejawantahan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia. GPN menjadi terobosan dalam menghilangkan fragmentasi melalui interkoneksi dan interoperabilitas antar Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
7. Kami mencermati, ditengah pesatnya kebutuhan bertransaksi, masih terdapat fragmentasi, inefisiensi, dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen. Fragmentasi muncul karena kecenderungan industri untuk membangun platform sistem pembayaran yang sifatnya eksklusif, yaitu hanya dapat melayani instrumen yang diterbitkannya sendiri. Platform-platform yang ada juga belum saling terhubung atau *interconnected* satu sama lain, sehingga belum mampu menyediakan ekosistem layanan yang dapat saling melayani (interoperabel). Ilustrasi paling sederhana yang sering kita jumpai adalah banyaknya deretan mesin ATM di mall dan berjejeranya mesin EDC di kasir supermarket.
8. Fragmentasi tersebut pada gilirannya melahirkan inefisiensi, yang dapat dilihat dari beberapa hal utama, yaitu:
  - Biaya investasi perluasan infrastruktur dan teknologi menjadi tinggi, karena industri enggan berbagi layanan, seperti investasi mesin ATM dan EDC yang begitu besar hanya untuk di satu lokasi.

Padahal, apabila mesin-mesin tersebut dapat saling interoperabel, terdapat potensi yang begitu besar untuk merelokasinya ke daerah-daerah di penjuru tanah air yang masih mengalami kekurangan. Sehingga akan mampu mendorong perluasan akses dan keuangan inklusif di Indonesia.

- Masyarakat menjadi perlu untuk memiliki banyak kartu, karena akseptasi kartu yang masih terbatas. Hal ini dikarenakan kartu tertentu hanya dapat digunakan di mesin terminal pembayaran tertentu, akibat setiap ATM atau EDC tidak dapat menerima semua jenis kartu.
  - Kalaupun diterima, kartu yang digunakan pada terminal ATM / EDC yang berbeda akan dikenakan biaya yang relatif tinggi, dimana Merchant Discount Rate (MDR) dapat mencapai 2-3% per transaksi. Biaya ini tentu pada akhirnya ikut ditanggung oleh konsumen. Dari penurunan MDR saja penghematan secara ekonomi mencapai Rp1,3T sampai dengan Rp1,8T. Seiring dengan penggunaan GPN yang semakin luas, efisiensi yang ditimbulkan bagi perekonomian nasional tentunya akan semakin besar.
9. Kehadiran GPN diharapkan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran. dengan biaya lebih rendah. Biaya yang lebih rendah tersebut dapat dinikmati oleh pedagang (merchant) dan pembeli. Manfaat yang dirasakan oleh merchant adalah penurunan *Merchant Discount Rate* (MDR) yang semula berkisar antara 2% sampai dengan 3% menjadi hanya 1%. Sementara, masyarakat

pemegang kartu dapat menikmati turunnya biaya administrasi. Bahkan, untuk penerima bantuan sosial Pemerintah, GPN mengenakan MDR sebesar 0%. Sehingga, penerima manfaat atau bantuan tidak dikenakan biaya untuk melakukan pencairan.

10. Bagi bank, kehadiran GPN dapat memperluas akseptasi nasabahnya melalui kemudahan akses terhadap seluruh kanal pembayaran. Bank tidak perlu berkompetisi dalam menyediakan infrastruktur kanal pembayaran, sehingga dapat lebih leluasa dan fokus dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabahnya.
11. Kemanfaatan tersebut mendorong perbankan untuk memberikan dukungan yang kuat terhadap GPN sejak diperkenalkan hingga sampai pada tahap implementasi. Dari total 100 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), 98 diantaranya telah memperoleh persetujuan untuk menerbitkan kartu ATM dan Debet berlogo GPN.
12. Dalam rangka semakin memperluas akseptasi kartu berlogo GPN, Perbankan dan Bank Indonesia akan melakukan *joint campaign*. Kampanye GPN akan dilakukan di seluruh kota di Indonesia, dengan melibatkan peran seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD).

***Bapak dan Ibu yang kami banggakan,***

13. Sebelum sambutan ini, kita menyaksikan pernyataan komitmen yang kuat dari Lembaga Pendukung GPN. Penyelenggara GPN didukung oleh 3 lembaga yaitu Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan Lembaga *Services*.

14. Bank Indonesia telah menetapkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sebagai Lembaga Standar Kartu ATM dan Debet serta Lembaga Standar untuk Uang Elektronik. Lembaga Standar memiliki fungsi untuk menyusun, mengembangkan, dan mengelola Standar untuk interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, kanal pembayaran, dan switching, serta security.
15. Bank Indonesia juga sudah menetapkan Lembaga *Switching* yaitu Artajasa, Rintis, Alto, dan Jalin pada tahun 2017. Lembaga *Switching* memiliki tugas menyelenggarakan pemrosesan data transaksi pembayaran domestik secara aman dan efisien.
16. Selanjutnya, Bank Indonesia akan menetapkan PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) sebagai Lembaga *Services*, yang memiliki tugas antara lain menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah; melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelmen; mengembangkan sistem untuk pencegahan *fraud* serta menangani perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka perlindungan konsumen.
17. Pada kesempatan ini kami juga mengundang segenap mitra kerja dari industri perbankan dan sistem pembayaran baik domestik maupun eksternal untuk turut berpartisipasi dan mendukung GPN serta kebijakan-kebijakan sistem pembayaran lainnya. Kami yakin bahwa kebijakan yang telah kami luncurkan dapat menjaga kesinambungan perkembangan industri sistem pembayaran yang sehat di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, potensi pengembangan sistem pembayaran di Indonesia sangat luas seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus naik, pendapatan

masyarakat yang bertambah tinggi serta bonus demografi dengan komposisi usia produktif yang meningkat.

***Hadirin yang kami hormati,***

18. Implementasi GPN merupakan landasan bagi kebijakan-kebijakan Sistem Pembayaran ke depan seperti antara lain penguatan pengaturan uang elektronik dan standarisasi QR code. Selanjutnya, GPN juga merupakan titik tolak dari pengembangan-pengembangan terkait sistem pembayaran yang saat ini sedang kami koordinasikan dengan Pemerintah khususnya bersama Kementerian Sosial, Kementerian BUMN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pengembangan-pengembangan tersebut antara lain mencakup Perluasan Bansos nontunai, EBIPP (*Electronic Bills/Invoices Presentment and Payment*) untuk mewujudkan sistem layanan yang bersifat nasional untuk pembayaran tagihan serta *Multi Lane Free Flow* (MLFF) untuk jalan tol.
19. Terkait Uang Elektronik, kami telah melakukan penguatan regulasi yang mencakup Penguatan terhadap aspek kelembagaan Penerbit uang elektronik antara lain melalui pengaturan modal minimum. Selain itu dilakukan penguatan aspek perlindungan konsumen dan aspek keamanan serta akseptasi uang elektronik melalui kewajiban peningkatan standar keamanan transaksi dan kewajiban pemrosesan domestik melalui GPN. Melalui langkah-langkah penguatan ini, integritas dan keamanan nasional serta resiliensi sistem keuangan nasional diharapkan akan tetap terjaga, tanpa menghambat laju inovasi dan perkembangan industri yang dinamis.

20. Selanjutnya terkait QR Code, Bank Indonesia memandang perlu standardisasi nasional untuk QR Code *payment* di Indonesia. Saat ini standar nasional QR Code tengah kami susun bersama-sama dengan *stakeholders* yaitu asosiasi, perbankan dan industri teknologi finansial. Standar nasional QR Code menurut rencana akan segera kami tetapkan dalam waktu dekat.

***Tamu dan Undangan yang kami muliakan,***

21. Sebagai akhir sambutan kami, sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kementrian dan Lembaga terkait, industri, serta asosiasi atas dukungannya terhadap kesuksesan pengembangan dan implementasi GPN.
22. Dengan kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dengan baik, kami yakin bahwa tujuan GPN sebagai Pemersatu Transaksi Pembayaran Nasional dapat diwujudkan. Semoga Tuhan YME senantiasa merestui dan meringankan langkah kita bersama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera.

***Sekian dan Terima Kasih***

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

**Gubernur Bank Indonesia  
Agus D.W. Martowardojo**